

KAJIAN PAGU INDIKATIF RAPBN TA 2026



**Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI**

KAJIAN PAGU INDIKATIF RAPBN TA 2026 KOMISI VII

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Penanggungjawab

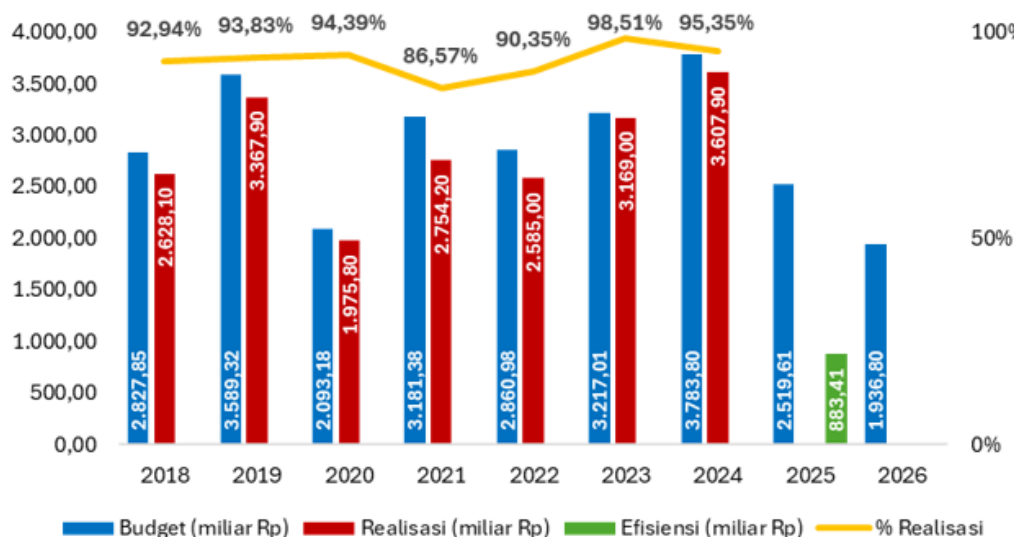
Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA
Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas
Keuangan Negara

Penulis

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D
Ervita Luluk Zahara, S.E., M.E.
Indah Pranchiska, S.E.

Overview Pagu Indikatif Kementerian Perindustrian

Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

1.936,80

APBN 2025 (miliar Rp)

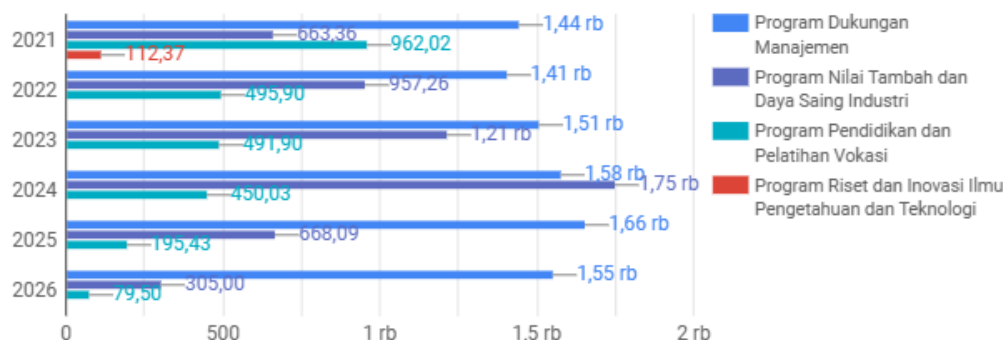
2.519,61

Efisiensi 2025 (miliar Rp)***

883,41

35.1%

Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program

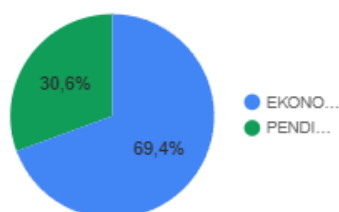


*) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024.

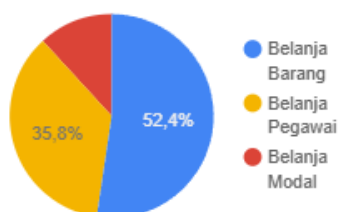
**) Angka 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025

***) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025. Bagi K/L yang tidak memiliki angka efisiensi, dikarenakan pembahasan di DPR merupakan rapat tertutup.

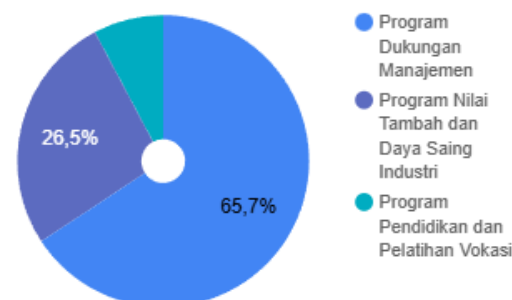
Belanja K/L Berdasarkan Fungsi TA Berjalan



Belanja K/L Berdasarkan Jenis Belanja TA Berjalan



Belanja K/L Berdasarkan Program TA Berjalan



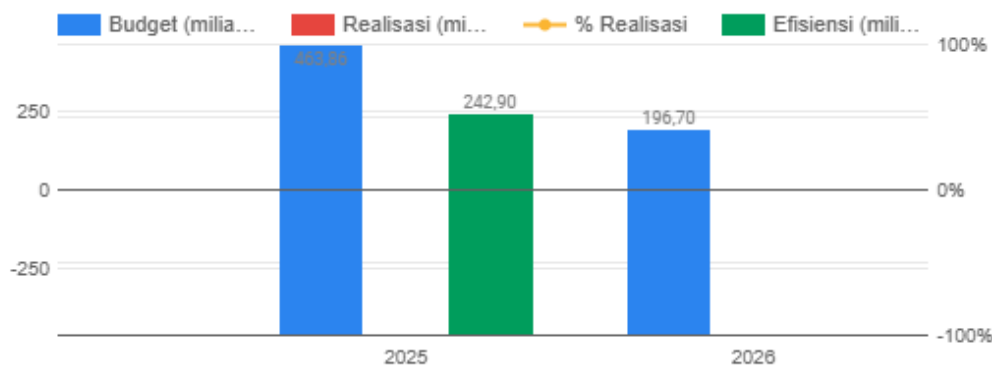
Highlights Overview Pagu Indikatif Kementerian Perindustrian

- Alokasi pagu anggaran Kementerian Perindustrian dalam kurun tahun 2018-2024 menunjukkan tren fluktuatif yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp2.827,85 miliar, kemudian naik pada tahun 2019 (Rp3.589,32 miliar), turun pada tahun 2020 (Rp2.093,18 miliar), lalu naik signifikan lagi hingga tahun 2024 (Rp3.783,80 miliar), dengan realisasi di atas 90 persen setiap tahun kecuali pada tahun 2021 (86,57 persen).
- Pada tahun 2025-2026, alokasi pagu anggaran Kementerian turun cukup signifikan yaitu pada tahun 2025 sebesar Rp2.519,61 miliar, dengan angka efisiensi sebesar Rp883,41 miliar, dan pada tahun 2026 menjadi Rp1.936,80 miliar.
- Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2024, secara umum, Kementerian Perindustrian mencatat berbagai capaian positif sepanjang tahun 2024. Namun, masih terdapat sejumlah indikator kinerja strategis yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang masih perlu diatasi secara lebih sistematis. Terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah sebagai berikut:
 - 1) Dari sisi makro, indikator pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas tahun 2024 hanya mencapai 4,75 persen, masih di bawah target sebesar 5,80 persen. Persentase tersebut masih jauh di bawah target Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas, yang ditargetkan menjadi sebesar 8,4 persen pada tahun 2024. Demikian pula, kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional tercatat sebesar 17,16 persen, belum memenuhi target 17,90 persen. Kinerja ini mencerminkan bahwa peran strategis industri pengolahan sebagai pengungkit utama perekonomian masih belum maksimal, antara lain disebabkan oleh ketergantungan bahan baku impor, ketidakpastian global, dan rendahnya penetrasi pasar ekspor untuk produk teknologi tinggi.
 - 2) Indikator lainnya yang belum tercapai meliputi aspek ketenagakerjaan dan produktivitas. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja nasional hanya mencapai 13,80 persen dari target 14,29 persen. Selain itu, produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas terealisasi sebesar Rp120 juta per orang per tahun, sedikit lebih rendah dari target Rp122,3 juta. Begitu pula dengan utilisasi kapasitas sektor industri, yang hanya mencapai 65,3 persen dari target 70,2 persen, menandakan bahwa kapasitas produksi industri belum dimanfaatkan secara optimal.
 - 3) Dalam konteks transformasi industri menuju era 4.0, kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi juga belum menunjukkan hasil signifikan. Adapun realisasi sebesar 11,95 persen masih di bawah target 13,70 persen, mencerminkan tantangan dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk berbasis teknologi tinggi. Di sisi lain, program substitusi impor belum sepenuhnya berhasil. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar -4,58 atau tidak mencapai target berdasarkan Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 35 persen.

- 4) Dari sisi pengembangan wilayah industri, Kementerian Perindustrian juga belum sepenuhnya mencapai target. Jumlah kawasan industri (KI) dengan zona tematik yang beroperasi hanya mencapai 4 dari target 5 kawasan (capaian 80 persen), dan kawasan industri prioritas di luar Jawa yang beroperasi adalah sebanyak 16 dari 17 kawasan (capaian 94,12 persen). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya percepatan dalam proses perizinan, penyediaan infrastruktur, serta dukungan investasi di luar wilayah Jawa.
- Adapun dari total anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2025 sebesar Rp2.519,61 miliar, sebanyak 27,1 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 35,9 persen untuk belanja pegawai, 19,1 persen untuk belanja operasional, dan 17,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Hilirisasi Industri Pengolahan Kakao dan Coklat, dan Hilirisasi Grafit untuk mendukung Ekosistem Industri *Electric Vehicle* (EV) Nasional. Selanjutnya, proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026-2029 yang mendukung sebagian atau seluruh dari 5 agenda pembangunan jangka menengah-panjang, antara lain Transformasi Ekonomi dengan program pembangunan Penguatan Produktivitas Industri Padat Karya Terampil melalui kegiatan Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri, program pembangunan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Diklat Sistem 3 in 1 dan program pembangunan Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi melalui kegiatan IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan.
 - Secara keseluruhan, indikator-indikator yang belum tercapai pada tahun 2024 mencerminkan adanya ruang untuk perbaikan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan kebijakan, maupun penguatan sinergi lintas sektor. **Komisi VII DPR RI perlu mendorong Kementerian Perindustrian** agar lebih fokus pada penyediaan infrastruktur pendukung, pemanfaatan teknologi industri secara menyeluruh, serta memperkuat kebijakan substitusi impor dan perluasan pasar ekspor untuk mendorong pertumbuhan industri nasional yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing tinggi.

Overview Pagu Indikatif Kementerian UMKM

Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

196,70

APBN 2025 (miliar Rp)

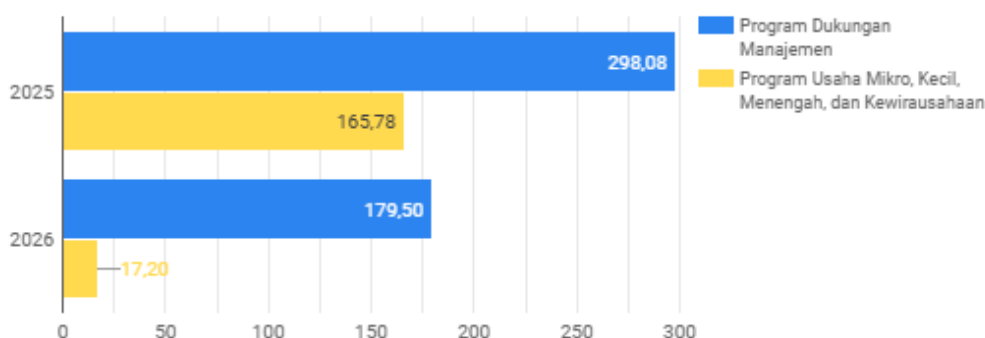
463,86

Efisiensi 2025 (miliar Rp)***

242,90

52,4%

Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program

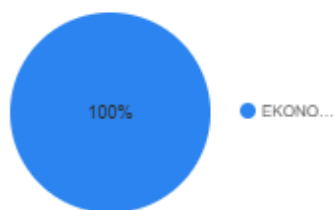


*) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024.

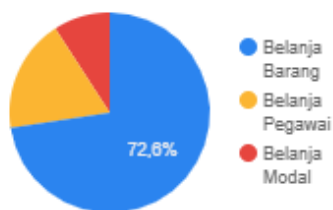
**) Angka 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025

***) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025. Bagi K/L yang tidak memiliki angka efisiensi, dikarenakan pembahasan di DPR merupakan rapat tertutup.

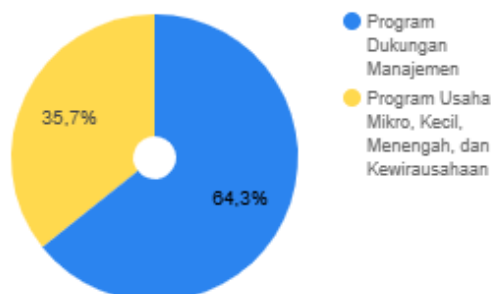
Belanja K/L Berdasarkan Fungsi TA Berjalan



Belanja K/L Berdasarkan Jenis Belanja TA Berjalan

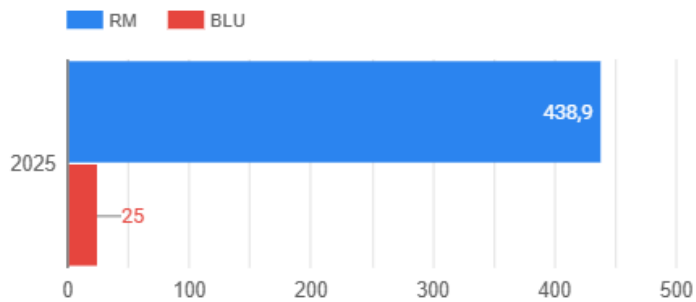


Belanja K/L Berdasarkan Program TA Berjalan

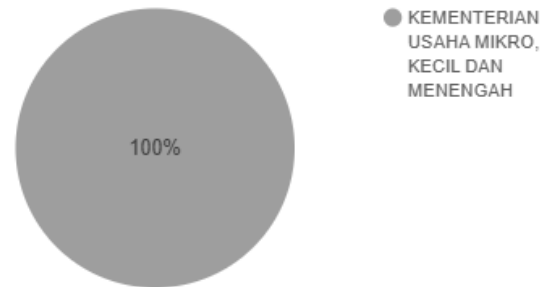




Sumber Dana Belanja K/L TA Berjalan



Belanja K/L Berdasarkan Eselon I TA Berjalan



Perkembangan Pagu vs Realisasi Belanja K/L Berdasarkan Program

Year / Budget (miliar Rp) / Realisasi (miliar Rp)				
Program	2024		2025	
	Budget (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Budget (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)
Program Dukungan Manajemen	179,5	-	298,08	-
Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan	17,2	-	165,78	-
Total keseluruhan	196,7	0	463,86	0

**j) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024. **j) Angka 2025 merupakan angka rancangan Belanja K/L TA 2025 bersumber dari NK RAPBN Tahun 2025.*

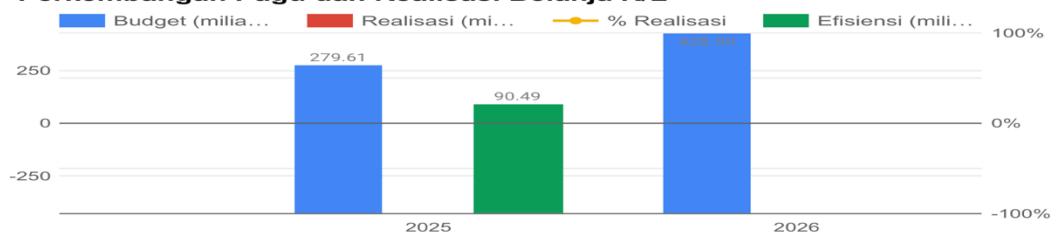
**Kementerian/lembaga baru di 2024, dibentuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran 2025-2029*

Highlights Overview Pagu Indikatif Kementerian UMKM

- Tahun 2025 menjadi tonggak awal operasional penuh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) sebagai entitas baru hasil restrukturisasi kelembagaan pemerintahan. Pembentukan kementerian ini bertujuan memperkuat fokus pemerintah dalam mengembangkan ekosistem UMKM dan kewirausahaan nasional yang berperan strategis dalam penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, serta pemulihan dan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
- Berdasarkan alokasi anggaran tahun 2025, Kementerian UMKM memperoleh pagu indikatif sebesar Rp463,86 miliar. Seluruh anggaran ini bersumber dari Rupiah Murni. Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja kementerian/lembaga, nilai efisiensi yang disepakati bersama DPR RI mencapai Rp242,90 miliar atau sekitar 52,4 persen dari total pagu. Dengan demikian, pagu efektif yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian UMKM sepanjang tahun anggaran berjalan diperkirakan berada pada kisaran Rp221 miliar.
- Dua program utama yang menjadi kerangka pelaksanaan belanja Kementerian UMKM tahun 2025 adalah Program Dukungan Manajemen dan Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan. Alokasi terbesar berada pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp298,08 miliar atau sekitar 64,3 persen dari total pagu, sedangkan sisanya sebesar Rp165,78 miliar dialokasikan untuk Program UMKM dan Kewirausahaan. Berdasarkan struktur belanja, komposisi anggaran masih sangat didominasi oleh belanja pegawai sebesar 72,6 persen, sementara sisanya digunakan untuk belanja barang dan modal. Seluruh belanja Kementerian ini masuk dalam klasifikasi fungsi ekonomi, yang mencerminkan mandat utamanya dalam mendukung pemberdayaan dan transformasi pelaku usaha kecil di seluruh wilayah Indonesia.
- Meskipun baru dibentuk, Kementerian UMKM memiliki proyeksi pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp196,70 miliar. Tren ini menunjukkan bahwa pada tahun kedua pelaksanaan program, fokus kementerian diarahkan pada konsolidasi kelembagaan dan efisiensi belanja, sembari terus memperkuat kapabilitas internal serta membangun sinergi lintas sektor dalam pengembangan UMKM.
- Seiring dengan terbatasnya ruang fiskal serta dominasi belanja rutin, Kementerian UMKM perlu mendapatkan dukungan kebijakan yang strategis dari Komisi VII DPR RI agar mampu mengoptimalkan peranannya dalam mendorong program-program pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang bersifat langsung menyentuh masyarakat. Penekanan perlu diberikan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan program kewirausahaan, penguatan akses pembiayaan, perluasan literasi digital dan keuangan bagi pelaku UMKM, serta integrasi data dan pendampingan usaha berbasis desa dan komunitas. Harmonisasi program dengan kementerian/lembaga lain seperti KemenkopUKM, Kemenkeu, dan BUMN penyedia pembiayaan ultra mikro juga menjadi aspek penting untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan sinergi kebijakan dalam satu ekosistem UMKM nasional.
- Dengan perhatian yang tepat terhadap efisiensi anggaran, penguatan kelembagaan, serta keberpihakan program pada pelaku usaha skala kecil, Kementerian UMKM diharapkan dapat tumbuh menjadi aktor kunci dalam membentuk struktur ekonomi yang lebih inklusif dan tangguh di masa mendatang.

Overview Pagu Indikatif Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L

**Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)**

428.50

APBN 2025 (miliar Rp)

279.61

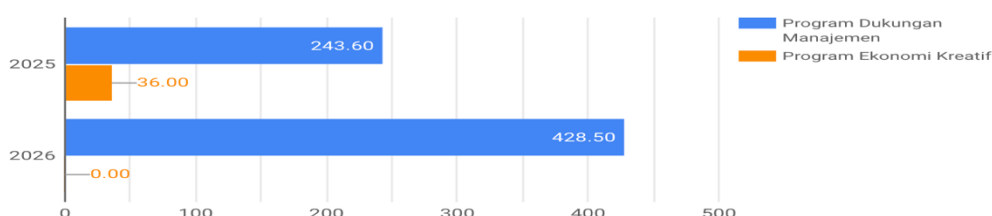
Efisiensi 2025 (miliar Rp)**

90.49

32.4%

279.61

Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program



*) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024.

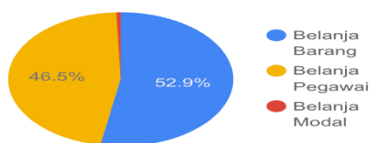
**) Angka 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025

***) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025. Bagi K/L yang tidak memiliki angka efisiensi, dikarenakan pembahasan di DPR merupakan rapat tertutup.

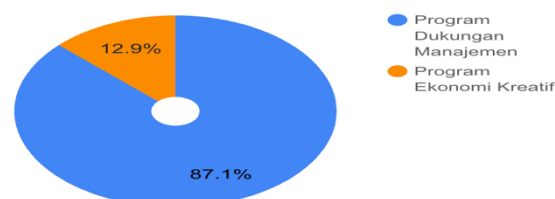
Belanja K/L Berdasarkan Fungsi TA Berjalan



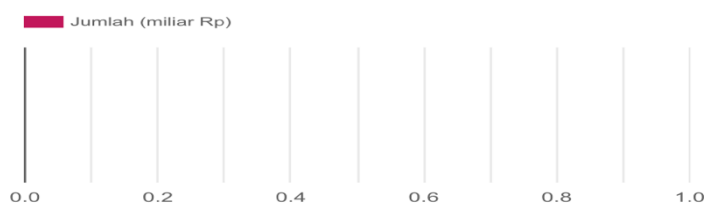
Belanja K/L Berdasarkan Jenis Belanja TA Berjalan



Belanja K/L Berdasarkan Program TA Berjalan



Sumber Dana Belanja K/L TA Berjalan



Belanja K/L Berdasarkan Eselon I TA Berjalan



Perkembangan Pagu vs Realisasi Belanja K/L Berdasarkan Program

Year / Budget (miliar Rp) / Realisasi (miliar Rp)				
Program	2026		2025	
	Budget (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Budget (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)
Program Dukungan Manajemen	428.5	-	243.6	-
Program Ekonomi Kreatif	0	-	36	-
Grand total	428.5	0	279.61	0

**). Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024. **). Angka 2025 merupakan angka rancangan Belanja K/L TA 2025 bersumber dari NK RAPBN Tahun 2025.*

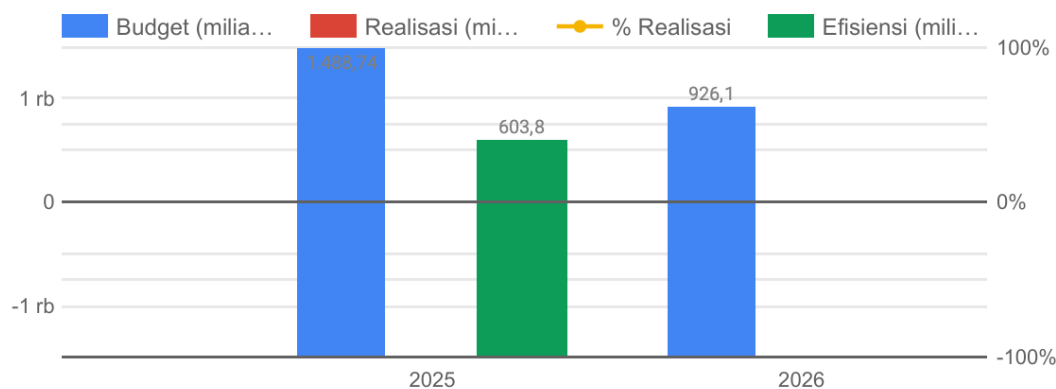
Looker Stu

Highlights Overview Pagu Indikatif Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

- Tahun 2025 menjadi awal pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sebagai entitas mandiri yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan Perpres Nomor 199 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 200 Tahun 2024, pemisahan ini dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan nasional.
- Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif memperoleh pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp279,6 miliar. Merujuk pada Inpres 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja K/L, total pagu anggaran setelah rekonstruksi sebesar Rp189,2 miliar. Alokasi belanja barang sebesar Rp147,9 miliar (52,9%), belanja pegawai sebesar Rp130 miliar (46,5%) dan belanja modal sebesar Rp1,7 miliar (0,6%). Berdasarkan program, alokasi anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif terbagi menjadi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp243,6 miliar dan Program Ekonomi Kreatif sebesar Rp36 miliar (12,9%).
- Untuk tahun 2025, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif menetapkan tujuh program prioritas atau *quick wins*, yaitu: (1) Pelatihan Juru Masak guna mendukung Makan Bergizi Gratis, (2) Inkubasi Ekraf di Kawasan *Food Estate*, (3) Penguatan SDM Ekraf melalui kolaborasi di Institusi Pendidikan, (4) *Engagement* dengan komunitas ekraf, (5) *Affiliator* SuperEmak, (6) Peningkatan Kapasitas Santri Kreatif, (7) Rantai Pasok Digital.
- Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VII DPR RI antara lain: Penguatan ekosistem ekonomi kreatif, implementasi Asta Ekraf yang masih perlu dioptimalkan kembali, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah wisata memerlukan kerja sama yang terintegrasi antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya
- Dengan capaian kinerja yang sangat tinggi di tahun 2024 serta kebutuhan penguatan kelembagaan pasca pemisahan, maka pagu indikatif sebesar Rp428 miliar perlu dijaga agar program prioritas tetap berjalan. Dukungan dari Komisi VII DPR RI menjadi penting untuk memastikan ekonomi kreatif sebagai Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Overview Pagu Indikatif Kementerian Pariwisata

Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

926,10

APBN 2025 (miliar Rp)

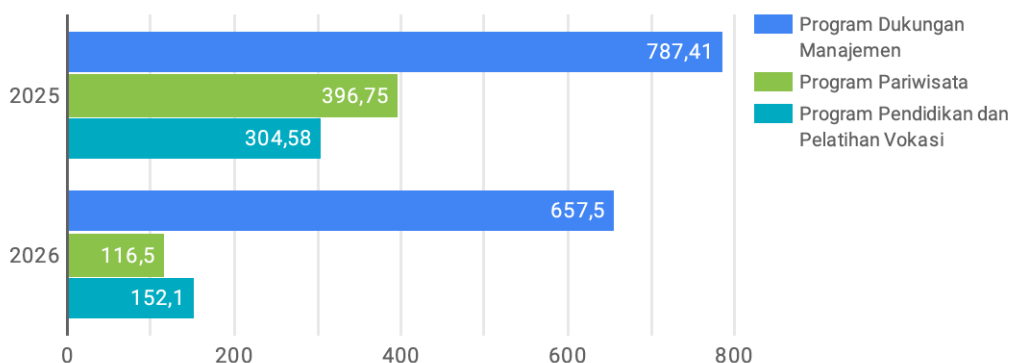
87,30

Efisiensi 2025 (miliar Rp)***

603,80

40.6%

Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program



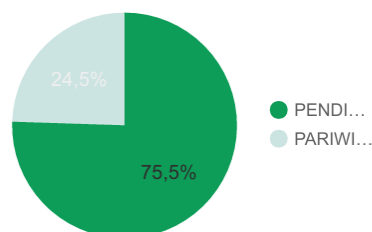
1.488,74

*) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024.

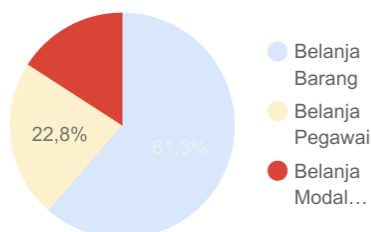
**) Angka 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025

***) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025. Bagi K/L yang tidak memiliki angka efisiensi, dikarenakan pembahasan di DPR merupakan rapat tertutup.

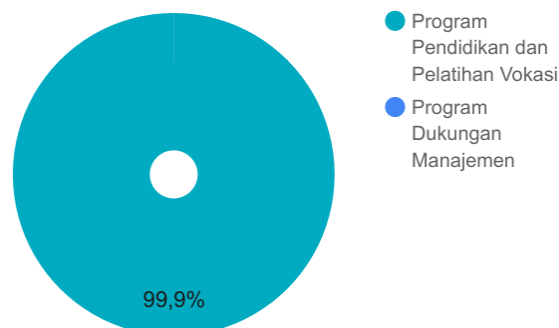
Belanja K/L Berdasarkan Fungsi TA Berjalan



Belanja K/L Berdasarkan Jenis Belanja TA Berjalan

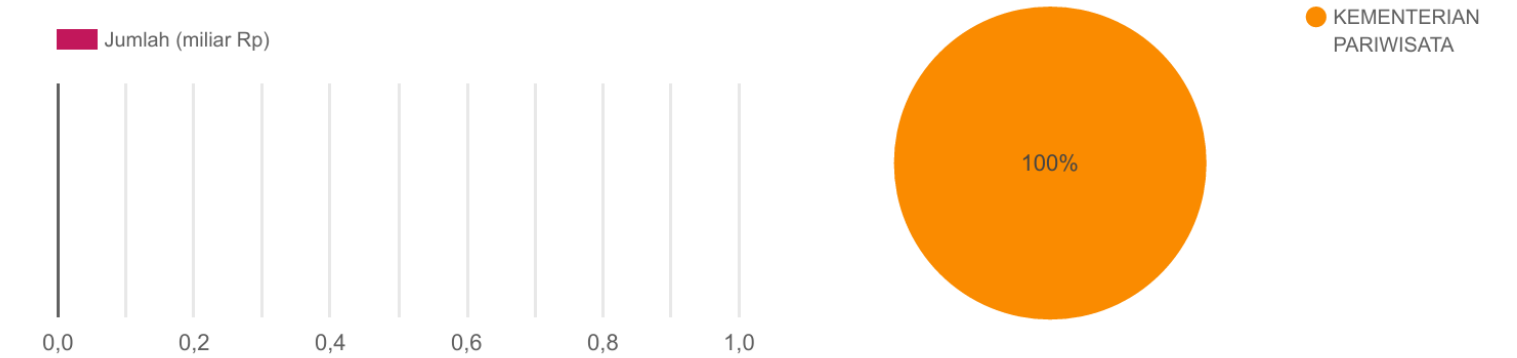


Belanja K/L Berdasarkan Program TA Berjalan



Sumber Dana Belanja K/L TA Berjalan

Belanja K/L Berdasarkan Eselon I TA Berjalan



Perkembangan Pagu vs Realisasi Belanja K/L Berdasarkan Program

Year / Budget (miliar Rp) / Realisasi (miliar Rp)				
Program	2026		2025	
	Budget (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Budget (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)
Program Dukungan Manajemen	657,5	-	787,41	-
Program Pariwisata	116,5	-	396,75	-
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	152,1	-	304,58	-
Total keseluruhan	926,1	0	1.488,74	0

*) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024. **) Angka 2025 merupakan angka rancangan Belanja K/L TA 2025 bersumber dari NK RAPBN Tahun 2025.

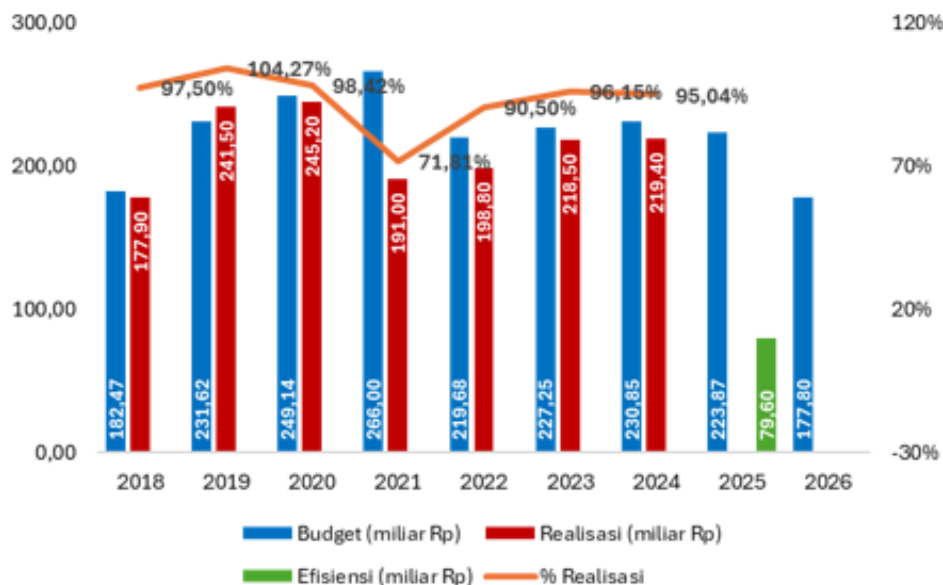
*Kementerian/lembaga baru di 2024, dibentuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran 2025-2029

Highlights Overview Pagu Indikatif Kementerian Pariwisata

- Tahun 2025 menjadi awal pembentukan Kementerian Pariwisata sebagai entitas mandiri yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan Perpres Nomor 198 Tahun 2024, pemisahan ini dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagai sektor unggulan nasional.
- Kementerian Pariwisata memperoleh pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp1.488,74 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp603,8 miliar merupakan hasil efisiensi sesuai pembahasan antara pemerintah dan DPR, merujuk pada Inpres 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja K/L. Dari total pagu tersebut, alokasi terbesar diberikan pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp787,41 miliar, disusul oleh Program Pengembangan Pariwisata sebesar Rp396,75 miliar, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp304,58 miliar. Komposisi belanja didominasi oleh belanja barang sebesar 61,3%, kemudian belanja pegawai 22,8%, dan belanja modal sekitar 15,9%.
- Perencanaan anggaran 2025 berangkat dari capaian kinerja Kemenparekraf tahun 2024 yang sangat baik. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 13,9 juta (133,5% dari target), dengan perolehan devisa sebesar USD 16,71 miliar (159,75% dari target). Sementara itu, wisatawan nusantara mencatatkan 1,02 miliar perjalanan, dan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara meningkat signifikan hingga USD 1.391.
- Untuk tahun 2025, Kementerian Pariwisata menetapkan empat program prioritas atau *quick wins*, yaitu: (1) kampanye nasional **Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI)**, (2) transformasi digital pariwisata melalui **Tourism 5.0**, (3) kolaborasi dengan kementerian/lembaga dalam penyesuaian **harga tiket pesawat**, dan (4) **peningkatan kualitas SDM** pariwisata melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis desa wisata.
- Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VII DPR RI antara lain: perlunya peningkatan alokasi untuk belanja modal dalam pembangunan infrastruktur pariwisata agar tidak menghambat pembangunan infrastruktur destinasi, penguatan dan kesinambungan program BBWI dan Tourism 5.0 untuk menjaga momentum capaian pariwisata yang sedang tinggi, serta dukungan terhadap sistem data pariwisata nasional berbasis teknologi seperti *Mobile Positioning Data* (MPD) agar kebijakan berbasis data akurat. Diperlukan *link and match* antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja di destinasi utama dan penyangga yang didukung dengan optimalisasi dana vokasi dan SDM Pariwisata. Selain itu, penyesuaian harga transportasi dan perluasan akses menuju destinasi wisata juga menjadi kunci dalam mendukung target kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di tahun mendatang.
- Dengan capaian kinerja yang sangat tinggi di tahun 2024 serta kebutuhan penguatan kelembagaan pasca pemisahan, maka pagu indikatif sebesar Rp1,488 triliun perlu dijaga agar program prioritas tetap berjalan. Dukungan dari Komisi VII DPR RI menjadi penting untuk memastikan kesinambungan pemulihan pariwisata sebagai penggerak ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan penyumbang devisa negara di masa mendatang.

Overview Pagu Indikatif Badan Standardisasi Nasional

Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

177,80

APBN 2025 (miliar Rp)

223,87

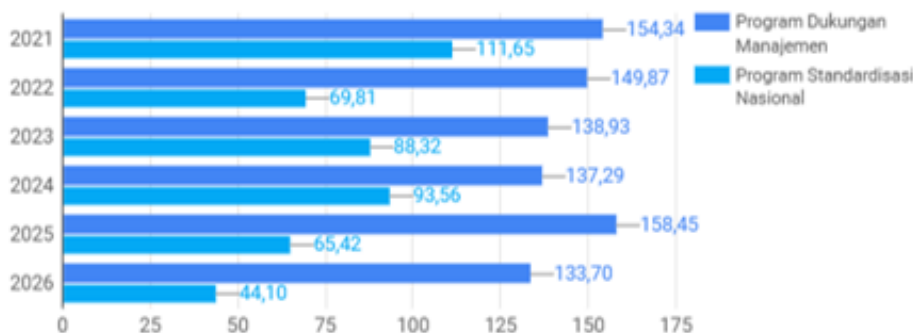
Efisiensi 2025 (miliar Rp)***

79,60

35,6%



Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program



*) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024.

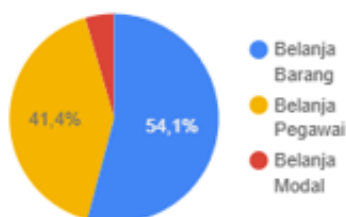
**) Angka 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025

***) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025. Bagi K/L yang tidak memiliki angka efisiensi, dikarenakan pembahasan di DPR merupakan rapat tertutup.

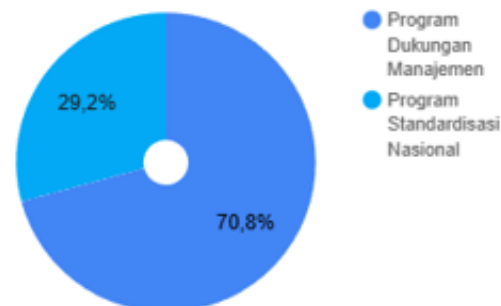
Belanja K/L Berdasarkan Fungsi TA Berjalan



Belanja K/L Berdasarkan Jenis Belanja TA Berjalan



Belanja K/L Berdasarkan Program TA Berjalan



Highlights Overview Pagu Indikatif Badan Standardisasi Nasional

- Alokasi pagu anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam kurun tahun 2018-2024 menunjukkan tren fluktuatif yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp182,47 miliar, kemudian naik signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp266 miliar. Selanjutnya mengalami penurunan alokasi pada tahun 2022 menjadi Rp219,68 miliar. Kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023 dan 2024 yaitu sebesar Rp227,25 miliar dan Rp230,85 miliar. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu hanya 71,81 persen.
- Pada tahun 2025-2026, alokasi pagu anggaran BSN turun cukup signifikan yaitu pada tahun 2025 sebesar Rp223,87 miliar, dengan angka efisiensi sebesar Rp79,60 miliar, dan pada tahun 2026 menjadi Rp177,80 miliar.
- Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional Tahun 2024, tidak ada target sasaran strategis maupun indikator kinerja yang tidak tercapai. BSN menetapkan 12 indikator kinerja untuk 6 sasaran. Dimana semua indikator kinerja mencapai ≥ 100 persen, dan beberapa melebihi batas maksimal evaluasi (dibatasi 120 persen). Seluruh target kinerja telah tercapai bahkan sebagian besar melampaui target, baik di tingkat sasaran strategis maupun program.
- Beberapa contoh indikator yang jauh melebihi target:
 1. Jumlah penambahan produk yang diakui dalam pengakuan internasional (CMC): target 7 dan realisasi 20, artinya persentase capaian sebesar 285,71 persen.
 2. Jumlah jenis produk yang telah ditetapkan SNI-nya dengan target 70 dan realisasi 102, artinya persentase capaian sebesar 145,71 persen.
- Perlu menjadi perhatian adalah capaian yang berada di atas batas evaluasi bisa jadi mencerminkan perencanaan target yang terlalu konservatif atau pengaruh sinergi eksternal yang belum dihitung.
- Pada tahun 2025, sebesar 27,4 persen dari total pagu anggaran BSN direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan seperti pengembangan standar dalam rangka mendukung ekspor, pemanfaatan jaringan pembinaan penerapan SNI kepada UMKM di daerah dan pengadaan peralatan laboratorium radiasi untuk alat kesehatan. Sedangkan proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan; implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional; pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi, pengelolaan sumber daya SPK dan reformasi birokrasi BSN.
- Meskipun kinerja BSN pada tahun 2024 memiliki capaian sangat tinggi secara kuantitatif (rata-rata capaian 128,16 persen, dan dibatasi menjadi 109,43 persen), ke depan, **Komisi VII DPR RI perlu mendorong BSN** untuk meningkatkan kualitas *output* dan *outcome* agar tetap menjadi fokus utama. Capaian angka tidak boleh mengaburkan tujuan strategis memperluas kebermanfaatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dalam pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing industri dan mendorong UMKM naik kelas. Diperlukan



kurasi dan bimbingan pelaku usaha agar bantuan penerapan SNI lebih tepat sasaran dan perlunya seleksi lebih ketat dalam pembimbingan penerapan SNI, khususnya bagi UMKM. Selain itu, masih diperlukan penyempurnaan sistem informasi (SNI Bina UMK) untuk mendukung *monitoring* dan pelaporan lebih akurat dan *real time*. Koordinasi lebih intensif lintas lembaga juga diperlukan agar hasil sertifikasi dan pengujian lebih diterima di pasar global.

Highlights Overview Pagu Indikatif Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia


- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperoleh pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp1,070 miliar. Merujuk pada Inpres 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja K/L, total pagu anggaran setelah rekonstruksi sebesar Rp170,9 miliar. Pada tahun anggaran 2025, LPP RRI memetakan sasaran utama meningkatkan kualitas pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan melalui media penyiaran, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat di seluruh wilayah NKRI. Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 mencakup pencapaian peringkat 10 dalam penilaian layanan dan skala 4 dalam kepuasan pemangku kepentingan, dengan harapan jangkauan siaran mencapai 96%. Prioritas nasional yang tertera mencerminkan fokus pada layanan inklusif dan berbasis digital, dengan penekanan pada penyiaran komunitas dan sektor prioritas, sejalan dengan tren global menuju digitalisasi media. Strategi implementasi, seperti pengadaan pemancar FM baru dan dukungan peralatan pendukung, akan menjadi kunci dalam meningkatkan jangkauan siaran. Pada Pagu Indikatif tahun 2026 RRI dialokasikan sebesar Rp784 miliar.
- Data jangkauan siaran menunjukkan bahwa LPP RRI berhasil mencakup 89,49% dari total kabupaten/kota di Indonesia, dengan total 460 kabupaten/kota yang tercover. Dari segi luas wilayah, LPP RRI mencakup 1.963.258 km², atau 89,61% dari total luas wilayah nasional, dan menjangkau populasi sebesar 93,23% dari jumlah penduduk, yakni 251.912.806 orang. Namun, masih terdapat 54 kabupaten/kota (10,51%) yang belum tercover, mencakup populasi 18.291.111 orang (6,77%).
- Dalam konteks wilayah 3T (terpencil, tertinggal, terdepan), jangkauan siaran menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebanyak 71 kabupaten/kota, yang mewakili 79,78% dari total, sudah tercover, dengan luas wilayah yang tercakup sebesar 578.091 km² (82,79%) dan populasi 15.530.608 orang (86,92%). Meskipun demikian, terdapat 18 kabupaten/kota (20,22%) yang belum tercover, yang meliputi 17,21% luas wilayah dan 13,08% populasi. Secara keseluruhan, meskipun LPP RRI telah menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam jangkauan siaran, masih ada tantangan untuk memperluas cakupan ke daerah yang belum tercover, terutama di wilayah 3T, guna memastikan pemerataan akses informasi dan layanan penyiaran di seluruh masyarakat Indonesia.
- Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VII DPR RI antara lain: perlunya fokus perluasan jangkauan di wilayah 3T, penguatan infrastruktur teknologi dan transisi ke digital, peningkatan kualitas konten inklusif dan lokal, penguatan layanan publik RRI, penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor.

Highlights Overview Pagu Indikatif Lembaga Penyiaran Publik TVRI

- Pagu Anggaran TVRI di tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1.422,2 miliar. Angka tersebut turun sebesar 9,59% dari APBN tahun 2024. Merujuk pada Inpres 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja K/L, total pagu anggaran TVRI setelah rekonstruksi sebesar Rp457,7 miliar. Pada Pagu Indikatif tahun 2026 TVRI dialokasikan sebesar Rp784 miliar.
- Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: turut berperan dalam agenda pembangunan Transformasi Ekonomi melalui Transformasi Digital yang tercermin dalam Rincian Output seperti: (1) Pembangunan Transmisi Pada Wilayah Layanan; (2) Penyediaan Multipleksing dan Fasilitas Teknik Pada Wilayah Layanan; (3) Penyediaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran; (4) Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Media Baru; (5) Siaran Informasi Publik Menuju Indonesia Emas; (6) Siaran Program Penguatan Ekonomi Kreatif; (7) Siaran Pendidikan Agama Dan Budaya; (8) Konten Pendukung Transformasi Digital; Serta (9) Siaran Peningkatan Kesehatan Dan Destinasi Wisata Berbasis Olahraga.
- Proyeksi kebijakan strategis TVRI pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan jangka menengah-panjang, antara lain dengan tetap mendukung Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi, dengan Program Pembangunan Penguatan Pondasi Utama Transformasi Digital.
- LPP TVRI memiliki kegiatan prioritas dan strategis terkait pengembangan infrastruktur penyiaran dengan output prioritas, antara lain: pembangunan transmisi, penyediaan peralatan penyiaran, penyediaan infrastruktur teknologi informatika dan media baru.
- Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VII DPR RI antara lain: perlu dipastikan bahwa seluruh output strategis benar-benar terintegrasi dalam arsitektur transformasi digital nasional, bukan hanya dalam bentuk pengadaan teknologi, tapi juga menyasar: Konektivitas ke wilayah blank spot dan 3T; Produksi konten digital inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat dan Penguatan SDM penyiaran dan produksi konten digital. Akselerasi digitalisasi dan modernisasi penyiaran yang perlu didukung dengan peningkatan kompetensi SDM. TVRI perlu memfokuskan pembangunan transmisi dan penyiaran di wilayah pada wilayah dengan tingkat literasi informasi rendah, memiliki kebutuhan konten edukatif tinggi (termasuk pendidikan agama, budaya, dan kesehatan) dan menjadi bagian dari destinasi super prioritas dan wisata olahraga.

KAJIAN PAGU INDIKATIF RAPBN TA 2026

 www.bkd.dpr.go.id

 [pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/pa3kn.bkdprri)

**Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara**